



# Parlementaria



3 Harapan  
Generasi Muda  
Soal Akses  
Air Bersih



7 Perbaikan  
Proses Legislasi &  
Alokasi  
Anggaran Air



Soroti  
Genosida Israel,  
Blokade Air  
Jadi Senjata



Jembatan  
Antar Parlemen  
Bahas Isu Air



## Diplomasi Air Promosikan Perdamaian Dunia

PARLIAMENTARY MEETING  
ON THE OCCASION OF 10<sup>TH</sup> WORLD WATER FORUM

MOBILIZING PARLIAMENTARY ACTION ON WATER  
FOR SUSTAINED PROSPERITY  
20 - 21 MAY 2024, NUSA DUA - INDONESIA

Nomor 1294/IV/V/2024 Mei 2024



9 772614 339005



# Diplomasi Air Promosikan Perdamaian Dunia

**D**iplomasi Air menjadi salah satu kunci untuk mempromosikan perdamaian melalui terbukanya dialog. Sebab itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai perlu adanya upaya kolektif dari multipihak terkait untuk menyelesaikan konflik air. Seharusnya, air hadir untuk mendekatkan hubungan antar-manusia, bukan menciptakan kesenjangan.

Demikian dinyatakan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Fadli Zon dalam Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5). Air, tegasnya, memiliki sifat mengalir tanpa mengenal batas.

Di sisi lain, dirinya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh *Inter-Parliamentary Union* (IPU) yang mengawali upaya Diplomasi Air. Di mana, upaya tersebut dimulai sejak agenda IPU *Roundtable on Water* pada tahun 2016 hingga inisiatif-inisiatif terbaru pada tahun 2023.

Sebagai contoh, digelarnya pertemuan parlemen yang diselenggarakan untuk membahas kontribusi sains terhadap perdamaian. Secara konsisten, sains dinilai berpotensi mengubah konflik menjadi faktor



Ketua DPR RI bersama Ketua BKSAP DPR RI dan delegasi lain meninjau hutan bakau.

kerja sama dan hidup berdampingan antarmanusia dan alam.

Parlemen negara-negara yang berada di area cekungan internasional, termasuk negara-negara pesisir, perlu memperkuat diplomasi terkait pengelolaan air lintas batas. “(Inisiatif) ini sebuah kemajuan yang memberi kita harapan akan masa depan yang damai dan masa depan

pengelolaan air yang damai,” ucap Fadli.

Politisi Fraksi Gerindra itu turut memaparkan soal dialog sains air. Menurutnya, parlemen negara-negara yang berada di area cekungan internasional, termasuk negara-negara pesisir, perlu memperkuat diplomasi terkait pengelolaan air lintas batas. **um/rdn**



Ketua DPR RI bersama Ketua BKSAP DPR RI dan delegasi WWF 2024 lainnya.



Scan QR untuk berita selengkapnya

# Harapan Generasi Muda Soal Akses Air Bersih



Ketua DPR RI Puan Maharani.

FOTO: OJI/AHA

**K**etua DPR RI Puan Maharani menutup jalannya sidang Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia (WWF) ke-10. Ia pun menekankan pentingnya terobosan untuk ketahanan air demi kemakmuran masyarakat dunia.

“Setelah dua hari berdiskusi, kini kita sampai pada akhir Pertemuan Parlemen pada WWF ke-10,” kata Puan dalam pidato penutup pertemuan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDC), Bali, Selasa (21/5). Pertemuan ini sendiri merupakan bagian dari Sidang WWF ke-10 di mana pada tahun 2024 ini, dimana Indonesia menjadi tuan rumah bersama Dewan Air Dunia (WWC).

Menurut Puan, apa yang disampaikan perwakilan generasi muda itu merupakan tantangan kepada Parlemen untuk menjawab kebutuhan mereka, dan menjawab kepentingan rakyat di seluruh dunia. “Apakah kita dapat menerjemahkan komitmen menjadi langkah konkret?” tukasnya.

Setelah melakukan beberapa kali sidang, parlemen dunia telah menyusun suatu *Communique* sebagai wujud upaya bersama Parlemen untuk mengatasi krisis air. Dalam *Communique* itu, parlemen dunia meneguhkan komitmen untuk memperbaiki alokasi sumber daya dan anggaran yang proporsional untuk air bersih.

um/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL PENGARAH**  
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

**WAKIL PIMPINAN REDAKSI**  
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)  
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

**REDAKTUR**  
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,  
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

**ANGGOTA REDAKSI**  
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,  
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,  
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom,  
Ubad Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlanti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

**ANALIS MEDIA**  
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,  
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

**IT MEDIA DIGITAL**  
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Zulfikar, S.A.B.

**ADMINISTRASI**

**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Khrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK  
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Jembatan Antar Parlemen Bahas Isu Air

**A**nggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Kamrussamad menegaskan pentingnya parlemen terlibat aktif terkait diplomasi air. Khususnya, dengan visi ideal air sebagai analogi yang mampu merawat bukan memecah belah masyarakat. Sebab itu, sebutnya, parlemen harus mengubah perspektif soal kebijakan air.

Hal ini menjadi sorotannya lantaran adanya sejumlah konflik yang cukup signifikan di dalam masyarakat. Berdasarkan data *Water Conflict Chronology* yang dibangun oleh *Pacific Institute for Studies in Development, Environment and Security* yang berfokus pada isu air tawar global dan regional, mencatat bahwa sedikitnya terjadi 1.634 konflik terkait akar sejak 2.500 tahun SM.

"Kami telah berkomitmen



Anggota BKSAP DPR RI Kamrussamad (tengah).

memperkuat pengaruh politik parlemen dengan membentuk Kaukus Parlemen tentang Air dan

Sanitasi sebagai forum antaranggota parlemen yang memiliki kepedulian akan isu air. Kaukus ini dapat menjadi jembatan aktivitas politik air anggota DPR baik di dalam maupun luar negeri," pungkasnya dalam sesi keempat pada agenda pertemuan parlemen di Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5).

Usai sesi tersebut, pertemuan parlemen ditutup dengan dirilisnya '*Nusa Dua Communiqué*', yang berisi poin kunci dan rekomendasi-rekomendasi parlemen yang tersimpulkan dari perhelatan dua hari tersebut. IPU dan DPR RI juga menyepakati akan menginformasikan *outcome* tersebut lebih lanjut pada pertemuan global IPU ke-149 Oktober mendatang.

[um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



**KAMI TELAH BERKOMITMEN MEMPERKUAT PENGARUH POLITIK PARLEMEN DENGAN MEMBENTUK KAUKUS PARLEMEN TENTANG AIR DAN SANITASI SEBAGAI FORUM ANTARANGGOTA PARLEMEN YANG MEMILIKI KEPEDULIAN AKAN ISU AIR. KAUKUS INI DAPAT MENJADI JEMBATAN AKTIVITAS POLITIK AIR ANGGOTA DPR BAIK DI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI.**

**Kamrussamad**

Anggota BKSAP DPR RI

# Perbaiki Proses Legislasi & Alokasi Anggaran Air

**A**nggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mendukung perlu adanya kerangka legislasi yang lebih komprehensif mengenai regulasi air dan sanitasi. Dukungan ini ia sampaikan usai mengikuti sesi pleno ketiga sebagai moderator pada agenda pertemuan parlemen di Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5).

“Meningkatnya jumlah penduduk yang diproyeksikan pada tahun 2040 membawa konsekuensi. Kebutuhan pangan dan energi semakin besar. Harus ada upaya bersama (dari) parlemen untuk melakukan perbaikan legislasi,” tutur Ravindra kepada **Parlementaria**.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, 70 persen air di dunia sebagian besar digunakan untuk sektor pertanian. 30 persen lainnya dimanfaatkan sektor lainnya dan konsumsi manusia. Jika tidak ada antisipasi, ia khawatir akan semakin membebani sumber daya air yang tersedia.

Tidak hanya air, Ravindra menekankan sumber energi yang



FOTO: OJIVAHA

Anggota BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga.

terkandung di dalam bumi juga terbatas. Pencegahan krisis air dan energi, ucapnya, harus segera dilakukan oleh multipihak, khususnya parlemen. Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendukung alokasi anggaran yang lebih baik untuk program air dan sanitasi. Upaya yang tidak didukung

oleh anggaran, tekannya, akan menjadi sia-sia.

Sebagai contoh, ia mencontohkan konsep ‘*Urban Digital Twin*’ yang diusung oleh negeri Korea untuk membentuk regulasi dan anggaran yang fleksibel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adanya contoh ini, dirinya berharap Indonesia bisa mengimplementasikannya ke depan.

“Saya harap kita bisa melakukan evaluasi sehingga kedepannya kita juga menghasilkan peraturan perundangan yang lebih baik dan memastikan anggaran yang dialokasikan (untuk tata kelola air dan energi) bisa jauh lebih baik,” tutupnya.

[um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# WWF 2024, Komitmen Politik Tangani Masalah Air dan Sanitasi

**W**akil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menekankan hasil dari agenda pertemuan parlemen di Forum Air Dunia (WWF) ke-10 akan disampaikan kepada Dewan Pemerintahan di *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dalam Sidang IPU ke-149 mendatang. Usaha ini merupakan penggalan dari rangkaian aksi nyata parlemen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) tahun 2030.

Baginya, tidak usaha yang sia-sia selama didukung oleh kemauan politik yang kuat dari berbagai multipihak yang berada di multisektor. Pernyataan ini dilontarkannya dalam agenda penutupan pertemuan parlemen di WWF di Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5).

“Sebagai forum parlemen global pertama yang membahas masalah air dan signifikansinya bagi keamanan dan kemakmuran global, pertemuan parlemen ini



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.

menandai komitmen parlemen untuk menangani masalah air dan sanitasi melalui kemauan dan tindakan politik kita,” ucapnya.

Ia pun menyoroti sejumlah catatan krusial yang menjadi pembahasan selama pertemuan parlemen berlangsung. Diantaranya, memastikan air menjadi agenda diskusi parlemen baik tingkat regional

dan internasional; pentingnya mempertimbangkan perspektif komunitas lokal; dan menerapkan aksi nyata sesuai dengan kebutuhan lokal dan pengetahuan tradisional.

Lalu, perlunya mengelola air secara berkelanjutan untuk membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem; mendukung adaptasi perubahan iklim yang telah disepakati internasional; dan meningkatkan diplomasi air dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

“Marilah kita ikut serta dalam memajukan kerja sama dan kolaborasi terkait air melalui komitmen dan tindakan bersama kita, karena ini penting untuk mendorong perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran dalam komunitas dan negara,” tutupnya. [um/rdn](https://www.um/rdn)

TIDAK USAHA YANG SIA-SIA SELAMA DIDUKUNG OLEH KEMAUAN POLITIK YANG KUAT DARI BERBAGAI MULTIPIHAK YANG BERADA DI MULTISEKTOR.

**Putu Supadma Rudana**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Soroti Genosida Israel, Blokade Air Jadi Senjata

**D**PR RI menyoroti penggunaan air yang digunakan sebagai alat senjata konflik dalam aksi genosida di Gaza, Palestina, baru-baru ini. Berbicara dalam pertemuan parlemen di Forum Air Dunia (WWF) ke-10, Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Himmatul Aliyah menggalang dukungan dalam komunitas parlemen global agar air tidak menjadi senjata genosida

“Apakah kita akan diam ketika semua akses kemanusiaan termasuk air, air layak minum, diblokade Israel?” tanya Himmatul kepada 49 perwakilan delegasi parlemen dalam sesi pleno ketiga pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10, Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5).

Ia mendesak seluruh anggota parlemen untuk konsisten menyuarakan keadilan demi memastikan akses terhadap air bersih



FOTO: OJJI/AHA

Anggota BKSAP DPR RI Himmatul Aliyah (tengah).

adalah keniscayaan untuk umat manusia. Ia juga menggarisbawahi keterhubungan akan ketersediaan

air dengan perubahan iklim.

Sesi tersebut juga memberi ruang perspektif bagi IPU, melalui Komite Pembangunan Berkelanjutan dalam bergerak untuk isu air. Mr. Maven William, anggota Parlemen Seychelles, dan Presiden Komite IPU untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam sesi tersebut, dirinya berpesan perlunya kolektivitas kerja dalam mengatasi tantangan re lintasbatas. Selain itu, tuturnya, perkembangan sains dan teknologi perlu dipantau agar dapat dipastikan hasil penelitian atau inovasi baru bersifat berkelanjutan, tidak bermanfaat hanya untuk jangka panjang.

“IPU memberi *platform* bagi kita untuk berbagi ide dan melihat kemungkinan solusinya,” tandasnya.

[um/rdn](#)



**PERLUNYA KOLEKTIVITAS KERJA DALAM MENGATASI TANTANGAN RE LINTASBATAS. SELAIN ITU, TUTURNYA, PERKEMBANGAN SAINS DAN TEKNOLOGI PERLU DIPANTAU AGAR DAPAT DIPASTIKAN HASIL PENELITIAN ATAU INOVASI BARU BERSIFAT BERKELANJUTAN, TIDAK BERMANFAAT HANYA UNTUK JANGKA PANJANG. IPU MEMBERI PLATFORM BAGI KITA UNTUK BERBAGI IDE DAN MELIHAT KEMUNGKINAN SOLUSINYA,**

## Himmatul Aliyah

Anggota BKSAP DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Parlemen Berbenah Diri, Jadikan Air Sumber Kehidupan Manusia

**A**nggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan parlemen dunia harus berbenah diri. Menurutnya, usaha ini perlu dilakukan mengingat hak atas air bersih dan sanitasi layak harus bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia.

Demikian hal ini disampaikannya di sela-sela agenda pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Salah satu pembenahan diri yang perlu dilakukan, sebutnya, adalah mengevaluasi dan memperbaharui undang-undang pengelolaan air.

"Waktunya kita berbenah diri dan mempelajari (pengalaman) dari negara-negara lain tentang



Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.

bagaimana harusnya negara hadir memastikan kelayakan air bagi seluruh masyarakat tanpa ada

satupun yang tertinggal karena air adalah kehidupan," tegas Irine kepada **Parlementaria**.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan Indonesia sangat membutuhkan payung hukum kuat melalui pembaharuan undang-undang untuk mengatur tata kelola air. Adanya agenda pertemuan parlemen yang membahas air ini, harapnya, juga bisa menumbuhkan kesadaran global untuk menjadikan air sebagai agenda politik dunia bersama.

"Tentu saja, forum yang sangat bergengsi ini harus membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat dunia dan Indonesia terutama menjawab tantangan tata kelola air yang baik dan berkeadilan bagi umat manusia," pungkasnya.

[um/rdn](#)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Eksplorasi Model Tata Kelola Air & Sanitasi

**P**arlemen dunia termasuk DPR RI saling berbagi wawasan terkait model inovasi yang diterapkan sejumlah negara untuk menyelesaikan isu air dan sanitasi. Demikian hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta pada sesi pleno pertama dalam agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

“Dalam pencarian kita soal solusi air dan sanitasi yang berkelanjutan, saya tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang model-model inovatif dan terukur yang telah berhasil secara internasional, khususnya dalam kemitraan publik-swasta.

Bagaimana model ini dapat diadaptasi dalam konteks sosio-ekonomi yang beragam, seperti yang terjadi di Indonesia?” ungkap Sukamta dalam sesi tersebut.

Hal ini menjadi sorotannya sebab Indonesia memiliki keunikan geografis sekaligus sosial dan budaya di dalamnya. Berangkat dari keunikan ini, solusi untuk menyelesaikan isu air dan sanitasi di Indonesia juga harus komprehensif, baik dalam konteks regulasi, sains, dan kearifan lokal setempat.

Sukamta menjelaskan DPR RI bersama Pemerintah Indonesia telah memperbaharui regulasi pengelolaan air di Indonesia melalui Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2029 Tentang Sumber Daya

Air. Regulasi tersebut, terangya, mengatur wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air.

Tidak hanya itu saja, regulasi tersebut juga memuat empat peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunannya yaitu PP Irigasi, PP Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), PP Sumber Air, PP Pengelolaan Sumber Daya Air.

Masing-masing PP itu, sebutnya, seharusnya telah diterapkan maksimal dua tahun sejak diberlakukannya UU Sumber Daya Air. “Walaupun regulasinya telah diperbarui, (kami menilai) perlu membutuhkan evaluasi dan adaptasi terus-menerus supaya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

— um/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta bersama seluruh delegasi DPR RI di WWF.

FOTO: OJ/HA

# Suarakan Kearifan Lokal Lindungi Kelestarian Air

**K**olaborasi pemangku kepentingan, baik tingkat lokal, regional, dan internasional, harus diupayakan supaya isu air dan sanitasi bisa menjadi agenda politik negara. Pendekatan kearifan lokal yang diselaraskan dengan pemikiran maju serta kemauan untuk menerapkan inovasi terbaru menjadi penting untuk diterapkan.

Pernyataan ini diutarakan oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat menyampaikan sikap DPR RI dalam sesi pleno ke-2 pada agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

"Oleh karena itu, semua sektor, termasuk dunia usaha, pemerintah, parlemen, dan masyarakat sipil harus berpartisipasi aktif dan



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana.

bekerja sama untuk memastikan pengelolaan dan alokasi sumber daya air yang lebih baik," tegas Putu.

Di sisi lain, dirinya menyadari

bahwa setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, memiliki prioritas agenda politik yang berbeda. Walaupun begitu, memperoleh hak atas air layak dan bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap negara. Upaya ini patut diterapkan, menurutnya, karena akan menjadi jembatan antar negara supaya kebijakan yang nantinya dilahirkan bisa menciptakan solusi yang mangkus dan sangkil.

Menutup pernyataan, Putu menekankan kearifan lokal yang telah dilakukan oleh penduduk setempat selama ratusan tahun demi melindungi kelestarian air harus didukung oleh multipihak. Maka, ia meminta dukungan sejumlah pemangku kepentingan agar peduli sekaligus melindungi kearifan lokal tersebut dengan mengambil sikap melalui regulasi dan hukum.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana bersama Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon meninjau pameran WWF.

Scan QR untuk berita selengkapnya



gum/aha

# Diplomasi Air, Capai Target SDGs Lewat IPTEK

**K**etua DPR RI Puan Maharani menilai agenda pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 Tahun 2024 ini berpotensi sebagai ruang berbagi wawasan antar parlemen dari berbagai negara. Tujuannya untuk menekan dampak dari isu krisis air yang kini terjadi di berbagai belahan dunia

Ia berharap isu krisis air yang dibahas bersama dalam WWF ke-10 ini bisa memperkuat komitmen politik negara, termasuk di antaranya parlemen. Upaya ini krusial agar poin ke-6 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicangkan oleh PBB berupa 'Air Bersih dan Sanitasi Layak' terwujud nyata.

"Pertemuan ini merupakan kesempatan berharga bagi parlemen untuk memperkuat komitmen, dan menghasilkan langkah konkret bagi pemenuhan mendasar manusia" ucap Puan membuka agenda



FOTO: OJ/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

pertemuan tersebut di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

Puan menilai perlunya mempertimbangkan aspek ilmu pengetahuan terkait untuk

menyelesaikan isu krisis air ini melalui diplomasi air. Ia menekankan bahwa peran ilmu pengetahuan sangat krusial demi menciptakan solusi yang sangkil dan mangkus melalui inovasi pengelolaan sumber daya air dan teknologi terpadu.

Ia pun meyakini masyarakat internasional, salah satunya parlemen, bisa berperan sebagai 'jembatan' dalam konteks alih teknologi dan transfer ilmu pengetahuan agar aksesibilitas air layak dan bersih bisa dirasakan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia.

"Dinamika perkembangan di abad 21 menuntut adanya diplomasi yang lebih inklusif termasuk dengan partisipasi parlemen yang lebih aktif dalam mencari berbagai solusi persoalan global, termasuk guna mengatasi kelangkaan air," jelasnya. [um/rdn](#)

**DINAMIKA PERKEMBANGAN DI ABAD 21 MENUNTUT ADANYA DIPLOMASI YANG LEBIH INKLUSIF TERMASUK DENGAN PARTISIPASI PARLEMEN YANG LEBIH AKTIF DALAM Mencari BERBAGAI SOLUSI PERSOALAN GLOBAL, TERMASUK GUNA Mengatasi KELANGKAAN AIR.**

**Puan Maharani**  
Ketua DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Ajang UMKM Tampilkan Inovasi Teknologi Air

**D**PR RI bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Dewan Air Dunia (WWC) meresmikan bersama-sama pembukaan agenda pameran Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5/2024). Mewakili parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi keterlibatan UMKM untuk menjaga kelestarian air.

"Ini kesempatan yang bagus bagi seluruh negara untuk memamerkan hasil inovasi melalui produk teknologi yang dihasilkan untuk menjaga kelestarian air. Saya harap UMKM bisa tumbuh dan berkembang," tutur Puan usai berkeliling di area pameran UMKM dalam agenda WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

Ia berharap keterlibatan aktif masyarakat sipil, salah satunya melalui UMKM, menjadi representasi keterlibatan rakyat untuk air yang lestari. Hal ini menjadi penting, sebutnya, supaya semakin banyak



Ketua DPR RI Puan Maharani membuka pameran WWF.

pihak memiliki kesadaran global untuk turut berpartisipasi.

"Dari pameran ini, kita melihat bagaimana kemajuan Indonesia mengelola air yang ada di Indonesia. Saya harap ini menjadi inspirasi untuk negara-negara yang

hadir," tandas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menambahkan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ingin pameran ini bisa membuka peluang ekonomi lewat inovasi produk air yang kreatif dan bertanggung jawab. Ia pun memaparkan pameran UMKM 'Indonesia Pavilion' ini melibatkan 100 UMKM dari berbagai negara.

Sebagai informasi, pameran tersebut menampilkan inovasi pengelolaan sumber daya air di Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Tidak hanya itu saja, sebanyak 43 sesi acara bincang, konser air, festival budaya, dan pelatihan kreatif untuk memeriahkan WWF ke-10 itu.

[um/rdn](https://www.um/rdn)



Scan QR untuk berita selengkapnya



# Buka Akses Air Layak dan Bersih untuk Palestina!

**S**ebanyak dua juta orang di dunia, berdasarkan data Bank Dunia, mengalami kesulitan untuk memperoleh akses air minum yang layak, termasuk penduduk Palestina. Merespons hal itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa air bersih dan layak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Demikian pernyataan tersebut disampaikan olehnya di sela-sela agenda pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia (WWF) ke-10 Tahun 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin (20/5).

“Apakah kita akan berdiam diri ketika semua akses kemanusiaan, termasuk air diblokir oleh Israel? Di manakah posisi kita? Padahal, Hukum Humaniter Internasional telah dengan jelas menyatakan bahwa penggunaan air diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. (Seharusnya) Infrastruktur



FOTO: OJI/AHA

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon.

air dan instalasi air minum harus dilindungi,” tutur Fadli.

Berdasarkan informasi yang diterima lebih dari 35.000 orang Palestina menetap di lokasi yang kerap di bombardir bom dan ditutup

dengan blokade rapat oleh Israel. Setiap 1 jam ditemukan 15 orang yang tewas. Kerusakan yang dihasilkan begitu luas di mana 83 persen sumber air telah rusak.

Sebab itu, Fadli menggalang dukungan agar akses air layak dan bersih bisa diperoleh siapapun. Baginya, air bersih dan layak akan selalu mengalir untuk memberikan denyut kehidupan tanpa memandang perbedaan geografi sekaligus status ekonomi dan sosial

“Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh anggota parlemen untuk terus menyuarakan keadilan. Meskipun perdamaian (di Palestina) masih belum pasti, memastikan ketersediaan air bersih bagi semua orang di Palestina secara umum harus diprioritaskan. Karena jika gagal, maka akan berakibat fatal bagi upaya global kita dalam mencapai tujuan SDGs ke-6, seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang menghadapi krisis air,” pungkasnya. **um/rdn**



Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# DPR dan Parlemen Dunia Kunjungi Kawasan Tahura Tanjung Benoa

**K**etua DPR RI Puan Maharani bersama Badan Kerja Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendampingi rombongan dari 45 perwakilan parlemen dunia berkunjung ke Kawasan Tahura Tanjung Benoa, Badung, Bali pada Selasa (21/5). Wilayah konservasi ini merupakan bagian dari restorasi hutan milik negara.

Momen kunjungan ini merupakan bentuk ungkapan terima kasih DPR RI atas kontribusi aktif para perwakilan parlemen dunia selama agenda Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 Tahun 2024. Harapannya, usai agenda ini, parlemen memiliki spirit yang sama menjadikan air sebagai agenda politik.

Kunjungan ke Kawasan Tahura Tanjung Benoa ini merupakan salah satu rangkaian sesi pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10. Tentunya, ini adalah salah satu bentuk upaya Indonesia untuk menunjukkan komitmen nyata melindungi keanekaragaman hayati.

"Inilah representasi Indonesia yang berupaya menjaga keselarasan



Ketua DPR RI bersama Ketua BKSAP DPR RI dan delegasi lain meninjau hutan bakau.

antara manusia dan hayati dengan menjaga kelestariannya termasuk air. Maka dari itu, restorasi hutan menjadi vital untuk dipertimbangkan sesuai yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris," ujar Puan kepada **Parlementaria**.

Sebagai informasi, Kawasan Konservasi Mangrove Taluma di Teluk Benoa, yang merupakan salah

satu tonggak ketahanan ekologi dan masyarakat di Bali. Memiliki luas 1.400 hektar, kawasan ini mewakili hampir 63 persen hutan bakau di Bali, memberikan peran penting terhadap lingkungan dan mata pencaharian penduduk setempat.

"Makna penting hutan bakau di Benoa tidak hanya sekedar ukurannya saja. Ekosistem terbentuk menjadi pusat keanekaragaman hayati, yang mencakup habitat yang kompleks dan kaya akan jalinan berbagai jenis tumbuhan seperti terumbu karang, padang lamun, dan dataran pasang surut. Mereka tidak hanya merupakan penghalang pelindung alami, namun juga penting untuk melindungi kualitas air bagi masyarakat pesisir," pungkasnya. [um/rdn](#)

“**INILAH REPRESENTASI INDONESIA YANG BERUPAYA MENJAGA KESELARASAN ANTARA MANUSIA DAN HAYATI DENGAN MENJAGA KELESTARIANNYA TERMASUK AIR. MAKA DARI ITU, RESTORASI HUTAN MENJADI VITAL UNTUK DIPERTIMBANGKAN SESUAI YANG DIAMANATKAN DALAM PERJANJIAN PARIS.**

**Puan Maharani**

Ketua DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Belum Ada Kejelasan Rencana Pembahasan Revisi UU TNI

**A**nggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menjelaskan belum ada kejelasan rencana pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurutnya, Komisi I sedang memperdalam hal tersebut dari sisi substansi.

“Jadi tadi baru mengobrol bagaimana revisi UU TNI apakah sudah sampai ke Baleg atau langsung ke Komisi I, belum ada kejelasan kami sedang perdalam dan substansinya seperti apa saya juga belum dapat,” kata TB Hasanuddin di Gedung Nusantara II usai RDP dengan Pemerintah, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).

Ia mengakui dirinya baru akan menyampaikan mengenai revisi UU tersebut setelah nantinya mendapatkan informasi lebih akurat. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun mengakui sudah mendapatkan informasi mengenai rencana pembahasan tersebut. Namun, ia enggan membocorkan hingga sudah ada kepastian dari pimpinan maupun Komisi I DPR.

“Saya pribadi hanya dapat



FOTO: MEN/aha

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin.

bocoran-bocoran tetapi saya tidak bisa membukanya ke publik dulu, karena yang namanya bocoran nih bocor dari mana,” ujarnya menerangkan.

Adapun hal yang akan dibahas dalam revisi UU TNI, dirinya menjelaskan bahwa ada beberapa poin

utama, diantaranya terkait masa pensiun. “Iya, jadi banyak hal yang pertama itu adalah status TNI, kemudian yang kedua itu usia dinas, ketiga status hubungan TNI dengan Kemenhan dan masalah masalah anggaran lainnya,” tuturnya.

Diketahui, sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi revisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri yang tengah digodok di DPR. Dasco menjelaskan, DPR sebelumnya telah melakukan revisi Undang-undang Kejaksaan pada 2021.

Ia mengatakan, revisi itu salah satunya mengubah usia pensiun dan usia jabatan fungsional jaksa. Usai revisi UU Kejaksaan itu, kata Dasco, ada permintaan untuk menyamakan revisi UU Kepolisian dan UU TNI dengan UU Kejaksaan. **hal/aha**

**IYA, JADI BANYAK HAL YANG PERTAMA ITU ADALAH STATUS TNI, KEMUDIAN YANG KEDUA ITU USIA DINAS, KETIGA STATUS HUBUNGAN TNI DENGAN KEMENHAN DAN MASALAH MASALAH ANGGARAN LAINNYA.**

**TB Hasanuddin**

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Setuju RUU 27 Kabupaten/ Kota Dibawa ke Paripurna

**K**omisi II DPR RI secara resmi menyetujui RUU 27 Kabupaten/Kota untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. RUU tersebut disetujui seluruh 9 Fraksi dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu dan Ketua Komite I DPD RI, Rabu (21/5/2024).

Dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, rapat didahului laporan Ketua Panja Junimart Girsang, pendapat akhir mini Fraksi PDI-Perjuangan, F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, F-PKB, F-Demokrat, F-PKS, F-PAN dan F-PPP serta pandangan mini Komite I DPD RI dan pernyataan akhir pemerintah diwakili Wamendagri.

Selanjutnya, agenda sampai pada Pengambilan Keputusan Tingkat I. "Sebelum saya ketuk, apakah kita seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II, wakil pemerintah, wakil DPD RI, setuju ke-27 RUU ini kita sepakati dan kemudian dibawa ke pembicaraan tingkat II Paripurna untuk menjadi Undang-Undang?" tanya Doli yang lantas dijawab



Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.

,"setuju," oleh seluruh peserta rapat.

Usai disetujui, acara kemudian dilanjutkan sesi penandatanganan dan pengesahan draf RUU 27

Kabupaten/Kota. Turut hadir Wamendagri didampingi Sekjen Kemendagri, Dirjen Pengembangan Keuangan Kemenkeu, Plt Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Ketua Komite I DPD RI.

Sebelumnya, dalam laporan Ketua Panja Komisi II DPR RI terhadap RUU 27 Kabupaten/Kota oleh Junimart Girsang yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyampaikan RUU 27 Kabupaten/ Kota tersebut mencakup dari beberapa wilayah di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Bangka Belitung.



**SEBELUM SAYA KETUK, APAKAH KITA SELURUH PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI II, WAKIL PEMERINTAH, WAKIL DPD RI, SETUJU KE-27 RUU INI KITA SEPAKATI DAN KEMUDIAN DIBAWA KE PEMBICARAAN TINGKAT II PARIPURNA UNTUK MENJADI UNDANG-UNDANG?**

**Ahmad Doli Kurnia**

Ketua Komisi II DPR RI

**pun/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Peleburan Badan Karantina Harus Permudah Birokrasi

**T**ransiisi penyatuan pengelola pelaksanaan karantina dalam satu wadah jangan sampai keluar dari filosofinya yakni untuk menyederhanakan birokrasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke kota Tangerang, Provinsi Banten.

“Filosofi dari undang-undang ini kan untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus tidak menyulitkan pengusaha kita. Sehingga kita ingin memastikan bahwa transisi ini pada ujungnya nanti NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) tidak memperpanjang birokrasi dan menyulitkan pengusaha,” ujar Slamet, Selasa (21/5).

Merger pengelolaan badan karantina ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 45



FOTO: NDN/AHA

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Pelaksanaan pengkarantinaan kini dilakukan dalam satu badan yang disebut Badan Karantina Indonesia.

Sebelum Badan Karantina

Indonesia terbentuk, beberapa kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah memiliki Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Hasil Perikanan (BKIPM). Kini dengan adanya Badan Karantina Indonesia, BKIPM dipecah. BKIPM milik KKP berganti nama menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Pemecahan BKIPM ke dalam Badan Karantina dan BPPMHKP kata Slamet akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat di Komisi IV. Ia menyoroti bagaimana pembagian sumber daya manusia (sdm) untuk kedua badan ini. “Akan kita tindaklanjuti dari pertemuan ini. Yang paling penting adalah soal SDM. Mudah-mudahan SDM yang berkompeten ini bisa terbagi secara baik sesuai tupoksi yang diinginkan,” pungkasnya. ndn/aha

**AKAN KITA TINDAKLANJUTI DARI PERTEMUAN INI. YANG PALING PENTING ADALAH SOAL SDM. MUDAH-MUDAHAN SDM YANG BERKOMPETEN INI BISA TERBAGI SECARA BAIK SESUAI TUPOKSI YANG DIINGINKAN.**

**Slamet**  
Anggota Komisi IV DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Desak Kemen-PUPR Serius Tangani Banjir Bandang Wajo

**K**omisi V DPR RI mendesak pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR untuk mengambil langkah serius dalam mengantisipasi serta menangani titik rawan banjir yang merendam 33 desa pada Jumat 3 Mei 2024 lalu, di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Diketahui, banjir tersebut terjadi akibat jebolnya tanggul sungai yang mengakibatkan beberapa bangunan rusak dan sekitar 23 ribu jiwa terdampak.

Dalam Kunjungan Kerja ke Kabupaten Wajo, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, menekankan pentingnya pemerintah untuk segera merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasi masalah banjir.

“Bencana banjir di Kabupaten Wajo ini sebenarnya sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Jadi, saya kira dari pihak Kementerian ataupun Balai sudah seharusnya bisa mengetahui titik-titik ke mana yang kira-kira yang sangat rawan untuk mendapatkan bencana banjir



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

tersebut. Oleh karena itu, kami meminta sekaligus mendorong kepada Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air agar supaya penanganan tanggul sungai Walanae

dan Cenranae ini betul-betul dioptimalkan,” ujar Andi Iwan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR ke Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu (22/5).

Hal ini menunjukkan komitmen dalam memastikan perlindungan dan mitigasi bencana, terutama di daerah yang rentan terhadap bencana alam seperti banjir. Diharapkan, langkah-langkah konkret akan segera diambil oleh pemerintah untuk mengimplementasikan strategi yang efektif guna mengurangi dampak buruk dari bencana banjir di Kabupaten Wajo. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada masyarakat setempat untuk juga aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. **blf/rdn**

**BENCANA BANJIR DI KABUPATEN WAJO INI SEBENARNYA SUDAH MENJADI LANGGANAN SETIAP TAHUNNYA. JADI, SAYA KIRA DARI PIHAK KEMENTERIAN ATAUPUN BALAI SUDAH SEHARUSNYA BISA MENGETAHUI TITIK-TITIK KE MANA YANG KIRA-KIRA YANG SANGAT RAWAN UNTUK MENDAPKANTKAN BENCANA BANJIR TERSEBUT.**

**Andi Iwan  
Darmawan Aras**

Wakil Ketua  
Komisi V DPR RI



# Bantu Pemprov Sumbar Revitalisasi Infrastruktur Tangani Bencana

**M**usibah yang melanda masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) begitu miris dengan bencana banjir bandang lahar dingin yang banyak memakan korban, pada Sabtu (11/5) kemarin. Korban pun semakin bertambah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Sumatera Barat bertambah menjadi 67 orang berdasarkan data dari Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB hingga Rabu (15/5/2024) pukul 12.10 WIB.

Pemerintah Pusat beserta Pemprov Sumbar melalui Pusdalops dan BPBD pun masih terus melakukan pemutakhiran data, menyusul masih dilaksanakannya proses pencarian dan evakuasi para korban. Menyikapi hal itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menemui Komisi V DPR RI yang diterima langsung Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat, di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).



FOTO: AFR/AHA

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal dan Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Mazaat bertemu Gubernur Sumbar.

Diwawancarai **Parlementaria** usai pertemuan, Muhammad Iqbal menyatakan pihaknya mengusulkan solusi penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Khususnya solusi jangka pendek, ia bilang, Komisi V siap segera menyampaikan aspirasi kepada Kementerian PUPR mengenai rekonstruksi jalan nasional yang putus di kawasan Lembah Anai ke Silaing.

Sebagai tindak lanjut, Komisi V mengharapkan Kementerian PUPR sesegera mungkin dalam sebulan hingga dua bulan ke depan bisa memperbaiki jalan tersebut, sehingga bisa segera dilalui oleh masyarakat.

Adapun untuk jangka panjang, sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sumbar, bahwa ada beberapa poin berkaitan dengan aspirasi anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Aspirasi anggaran itu salah satunya bertujuan untuk membangun sabodam atau cekdam, agar jika nantinya ketika sewaktu-waktu kembali terjadi lahar dingin kedepannya bisa dihambat, sehingga tidak lagi memakan korban jiwa masyarakat. **pun/rdn**

SEBAGAI TINDAK LANJUT, KOMISI V MENGHARAPKAN KEMENTERIAN PUPR SESEGERA MUNGKIN DALAM SEBULAN HINGGA DUA BULAN KE DEPAN BISA MEMPERBAIKI JALAN TERSEBUT, SEHINGGA BISA SEGERA DILALUI OLEH MASYARAKAT.

**Muhammad Iqbal**

Wakil Ketua  
Komisi V DPR RI

Scan QR  
untuk berita  
selengkapnya



# Varian Covid Singapura Tak Perlu Terlalu Dikhawatirkan



FOTO: AFR/ANSA

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

**V**irus Covid-19 kembali menjadi ancaman karena baru-baru ini kembali meningkat di Singapura dengan

varian baru Covid-19 KP.1 dan KP.2. Melihat kejadian ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai masyarakat tak perlu terlalu

khawatir karena virus Covid-19 ini status pandeminya sudah dicabut. Selain itu, ia juga meminta fasilitas Kesehatan (faskes) untuk melakukan antisipasi.

“Yang penting bahwa penyakit ini itu bisa diantisipasi oleh masyarakat Indonesia dengan baik maupun juga oleh faskes ya. Jadi kalau orang sakit itu kalau Faskesnya bisa ditangani kan aman ya. Jadi Covid ini juga sekarang bukan lagi pandemi, bukan lagi hal yang sangat luar biasa juga, walaupun naik pada musim tertentu itu ya tinggal diurus aja dengan baik,” ujar Melki sapaan akrabnya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5)

Sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit. Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai masyarakat tidak perlu terlalu khawatir seperti saat virus Covid-19 ini pertama kali muncul. Terlebih sejauh ini pasien Covid-19 masih dapat teratasi dengan baik dan tidak perlu harus ke rumah sakit.

Hal ini menandakan vaksinasi Covid-19 sukses dan kekebalan tubuh masyarakat Indonesia sudah berjalan dengan baik. “Jadi kita antisipasi seperti biasalah seperti penyakit-penyakit lainnya. Ini bukan lagi pandemi, sudah seperti flu dan sebagainya,” ujarnya. [gal/rdn](#)

**“YANG PENTING BAHWA PENYAKIT INI ITU BISA DIANTISIPASI OLEH MASYARAKAT INDONESIA DENGAN BAIK MAUPUN JUGA OLEH FASKES YA. JADI KALAU ORANG SAKIT ITU KALAU FASKESNYA BISA DITANGANI KAN AMAN YA. JADI COVID INI JUGA SEKARANG BUKAN LAGI PANDEMI, BUKAN LAGI HAL YANG SANGAT LUAR BIASA JUGA, KALAU NAIK PADA MUSIM TERTENTU ITU YA TINGGAL DIURUS AJA DENGAN BAIK.”**

**Emanuel Melkiades Laka Lena**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Pertanyakan Penggunaan Anggaran Pendidikan 20% dari APBN

**W**akil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mempertanyakan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN kepada Menteri Pendidikan budaya riset teknologi (Mendikbud Ristek). Hal itu menyusul gelombang protes dari mahasiswa dan masyarakat terkait kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia.

“Ada asumsi di luar (masyarakat) bahwa anggaran Pendidikan itu 20 persen dari APBN. Seandainya APBN kita di angka mungkin Rp 3300 Triliun, artinya kalau 20 persennya itu mestinya (anggaran pendidikan) di angka Rp665 Triliun. Itulah yang selalu ditanya, kemana saja anggaran Pendidikan ini,” ujar Dede di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Dijelaskannya, bahwa rapat kerja kali ini merupakan bagian dari



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi.

Panja Pembiayaan Pendidikan yang dibentuk oleh DPR RI. Hal itu sebagai respon atas ramainya permasalahan biaya UKT, termasuk di dalamnya pengelolaan anggaran Pendidikan bagi Perguruan Tinggi Negeri.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan yang diterima dan dikelola oleh Kementerian yang dipimpinnya itu pada tahun 2024 ini hanya 15 persen dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ada, atau sekitar Rp98,9 Triliun.

Dalam kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa prinsip dasar UKT itu harus mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Oleh karena itu, UKT itu harus selalu berjenjang, artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, maka mereka membayar lebih banyak, sementara mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu, membayar lebih sedikit.

ayu/rdn



**ADA ASUMSI DI LUAR (MASYARAKAT) BAHWA ANGGARAN PENDIDIKAN ITU 20 PERSEN DARI APBN. SEANDAINYA APBN KITA DI ANGKA MUNGKIN RP 3300 TRILIUN, ARTINYA KALAU 20 PERSENNYA ITU MESTINYA (ANGGARAN PENDIDIKAN) DI ANGKA RP665 TRILIUN. ITULAH YANG SELALU DITANYA, KEMANA SAJA ANGGARAN PENDIDIKAN INI.**

**Dede Yusuf Macan Effendi**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



# Permendikbud Jangan Timbulkan Misinterpretasi Alasan Naikkan UKT



FOTO: DEP/ANA

Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira.

**A**nggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk meninjau ulang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024



SAYA KIRA PERLU DITELUSURI (DITINJAU ULANG) LAGI (PERMENDIKBUD RISTEK). SEHINGGA JANGAN MENIMBULKAN MISINTERPRETASI ATAU MULTI-INTERPRETASI YANG KEMUDIAN MENYEBABKAN PTN MENGATAKAN TIDAK SALAH (MENAIKKAN UKT) KARENA PERMENDIKBUDNYA MEMBERIKAN RUANG.

**Andreas Hugo Pareira**

Anggota Komisi X DPR RI

tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi.

Hal ini karena, menurutnya, peraturan tersebut rentan untuk diinterpretasikan oleh sejumlah perguruan tinggi negeri terutama mengenai biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Saya kira perlu ditelusuri (ditinjau ulang) lagi (Permendikbud Ristek). Sehingga jangan menimbulkan misinterpretasi atau multi-interpretasi yang kemudian menyebabkan PTN mengatakan tidak salah (menaikkan UKT) karena Permendikbudnya memberikan ruang," tuturnya dalam Rapat Kerja Komisi X di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Andreas, terdapat sejumlah pasal pada Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 yang berpolemik dan rentan untuk diinterpretasikan secara semena-mena. Salah satunya, yakni pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi.

"Nah saya kira ini ini penting, sehingga tidak terjadi interpretasi yang menyebabkan seperti apa yang terjadi sekarang ini. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Dirjen bagus, ya apabila dilaksanakan dengan sesuai apa yang dimaksudkan gitu. tetapi munculnya masalah ini itu tadi ada beberapa poin yang menimbulkan polemik," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. [gal/rdn](https://www.gal/rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



# Panja Pembiayaan Pendidikan: Prioritaskan di Daerah 3T

**A**nggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah meminta agar Panja Pembiayaan Pendidikan dapat menekankan Pemerintah untuk memprioritaskan pembiayaan pendidikan di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Hal ini karena menurutnya perlu perhatian lebih bagi daerah 3T terutama untuk memenuhi sarana dan prasarana pendidikannya.

“Saya juga mohon nanti pada prioritas pembiayaan pendidikan ini, nanti kita akan tekankan juga untuk prioritas pembiayaan pendidikan ini di daerah 3T dengan di daerah lain ini harus berbeda,” ujarnya dalam Rapat Komisi X dengan Lembaga Pendidikan Keagamaan Swasta di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).

Anita sapaan akrabnya, berpendapat bila kebutuhan di daerah 3T baik di tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi terutama di Pulau Jawa dengan di



FOTO: FR/ANA

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah.

daerah 3T berbeda. Sehingga komponen-komponen untuk pembiayaan pendidikan di daerah 3T harus

menjadi perhatian khusus. Hal itu karena selama ini masih dipukul rata, contohnya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dirinya juga mengungkapkan kerap mendapat sejumlah aspirasi dari sejumlah guru-guru negeri di daerah terpencil yang masih berteriak soal keadilan. Lantaran terkadang tunjangan-tunjangan di daerah terpencil jarang dan telat dibayarkan.

“Jadi memang masih banyak persoalan dalam pembiayaan pendidikan, bicara soal kesejahteraan guru, bicara soal infrastruktur sekolah-sekolah, jalan menuju ke sekolah yang daerah-daerah sangat terpencil. Nah itu juga harus menjadi perhatian kita,” ungkap Legislator dapil NTT II itu.



**BILA KEBUTUHAN DI DAERAH 3T BAIK DI TINGKAT SEKOLAH DASAR, MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI TERUTAMA DI PULAU JAWA DENGAN DI DAERAH 3T BERBEDA. SEHINGGA KOMPONEN-KOMPONEN UNTUK PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T HARUS MENJADI PERHATIAN KHUSUS. HAL ITU KARENA SELAMA INI MASIH DIPUKUL RATA, CONTOHNYA SEPerti DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS).**

## Anita Jacoba Gah

Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Komisi VIII DPR RI mengunjungi embarkasi Banjarmasin dan Padang. Tujuannya meninjau persiapan penyelenggaraan haji para jemaah Indonesia, Rabu (22/5/2024).  
FOTO: RUN,AHA/AHA**

